

**EFEKTIVITAS PEMEKARAN KECAMATAN
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN**
Studi Deskriptif Kualitatif di Kecamatan Insana Tengah
Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur

Agustinus Naisaban, Mutia Rahmah
Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya
g23naisaban@gmail.com

ABSTRACT

Effectiveness of Sub-District Expansion in Improving Development. This study aims to determine the effectiveness of sub-district expansion in increasing development in Central Insana District, North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara Province. Expansion of Subdistricts in Central Insana Subdistrict has been regulated in the Regional Regulation of North Central Timor Number 8 of 2007 with the aim of equitable development, optimizing the implementation of governance and shortening the range of control of empowerment and community development services and accommodating aspirations that develop in the community. After 12 years running, the District Expansion policy has not shown a positive impact on the community, especially the development aspect. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques used were interviews, documentation and observation. The results showed that the policy of sub-district expansion in increasing development in Central Insana District was not yet effective, because of the weak role of the sub-district in providing services to the community. Budget limitations, inadequate transportation facilities and infrastructure and damaged road conditions, and a lack of active community participation in supporting the implementation of development in Central Insana Subdistrict, are classic reasons.

Keywords: *effectiveness, expansion, development*

ABSTRAK

Efektivitas Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemekaran Kecamatan di Kecamatan Insana Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2007 dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodasi aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Setelah 12 tahun berjalan, kebijakan Pemekaran Kecamatan belum menunjukkan dampak positif bagi masyarakat khususnya aspek pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah belum efektif, karena lemahnya peran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai dan kondisi jalan raya yang rusak, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah, menjadi alasan klasik.

Kata kunci: efektivitas, pemekaran, pembangunan

PENDAHULUAN

Pemberian hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dimaksudkan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Selain itu, peningkatan pembangunan dan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah juga menjadi harapan dalam pemberian otonomi daerah.

Pemberian otonomi daerah ini dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui secara detail permasalahan dan perkembangan di daerah. Hal ini kemudian mendasari perubahan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersifat *top down* menjadi *bottom up*. Dengan kata lain, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunannya, menentukan alokasi anggaran dan mendorong

partisipasi masyarakat di daerah dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa semua kewenangan pemerintah diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali kewenangan dasar yang tetap berada di bawah kendali pemerintah pusat. Dengan kata lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilaksanakan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana produk kebijakan sebelumnya.

Kebijakan otonomi daerah ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terlepas dari euforia dan optimisme semangat reformasi dan perkembangan demokrasi yang ditampilkan, ternyata masih dibutuhkan banyak revisi dan perubahan. Pemerintah Pusat yang

seharusnya menjadi panutan dalam pembuatan dan penerapan kebijakan yang berpihak kepada publik, malah cenderung mengutamakan kebijakan yang lebih peduli pada masalah penurunan defisit anggaran dan kesehatan fiskal dari pada memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Hak-hak dasar rakyat seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi prioritas kesekian di bawah kebijakan ekonomi. Selain itu, salah satu penyebab gagalnya pelaksanaan otonomi daerah adalah disfungsi dan mandulnya Pemerintah Daerah dan DPRD sehingga menyebabkan hak-hak dasar rakyat tidak terpenuhi. Gagalnya otonomi daerah dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat merupakan persoalan serius. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memastikan bahwa instrumen politik seperti pilkada mampu menghasilkan pemerintah daerah yang efektif, kredibel, dan bertanggung jawab, serta relevan dengan masyarakat dan daerah yang bersangkutan. Hal ini yang kemudian menjadi dasar untuk merevisi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turut melaksanakan otonomi daerah. Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ibukota Kefamenanu berusaha melaksanakan substansi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Berpedoman pada asas otonomi dan desentralisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara berusaha

mendekatkan diri dengan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan Hamdi (2002: 66) bahwa: “Hal nyata dari desentralisasi adalah keinginan untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat”. Kedekatan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan pembangunan dan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah.

Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tujuan percepatan yang diharapkan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kesulitan membangun kedekatan dengan masyarakat. Kesulitan ini diakibatkan oleh jauhnya rentang kendali pemerintah dalam hal ini jarak tempuh dari desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 1.

Tabel 1 di bawah menunjukkan data Kecamatan Insana sebelum dilakukan pemekaran yang masih memiliki 24 Desa atau Kelurahan, dilihat dari data jarak dari desa ke ibukota kecamatan, Permasalahan rentang kendali berpengaruh pada pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desa-desanya di Kecamatan Insana yang jauh dari rentang kendali pemerintahan (terutama Desa-Desa yang dicetak tebal) sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 1, merasakan keteringgalan dibandingkan dengan wilayah lain atau desa-desanya yang berdekatan dengan rentang kendali

pemerintahan. Kondisi ini merupakan dapat menyebabkan kesenjangan antar wilayah dengan tidak adanya pemerataan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara khususnya di Kecamatan Insana.

Tabel 1 Jarak dari Ibu Kota Kecamatan ke Desa-Desa di Kecamatan Insana Kabupaten TTU Tahun 2007

No	Desa/ Kelurahan	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (... km)
1	Subun	24
2	Usapinot	32
3	Lapeon	30
4	Atmen	10
5	Letneo	10
6	Nansean	18
7	Susulaku A	6
8	Ainiut	2,5
9	Loeram	7
10	Oinbit	5
11	Nunmafo	0,5
12	Manunain A	2
13	Manunain B	4
14	Tapenpah	6
15	Sekon	6
16	Lanaus	5
17	Letmafo	19
18	Maubesi	16
19	Banae	14
20	Tainsala	55
21	Sone	35
22	Desa Atmen	12
23	Susulaku B	22
24	Fatoin	1

Sumber: Kecamatan Insana Dalam Angka Tahun 2007

Kecamatan Insana merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Timor Tengah Utara, mencapai 20,94% dari luas

Kabupaten Timor Tengah Utara. Kondisi ini menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan pembentukan kecamatan baru melalui pemekaran kecamatan. Pembentukan kecamatan baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Timor Tengah Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2007 yaitu pembentukan Kecamatan Insana menjadi tiga Kecamatan meliputi kecamatan Insana, Kecamatan Insana Tengah, dan Kecamatan Insana Barat. Setelah melewati usia kecamatan minimal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kecamatan Insana Tengah memiliki 7 (tujuh) desa/ kelurahan di antaranya desa Lanaus, Letmafo, Tainsala, Sone, Letmafo Timur, Oehalo, dan Kelurahan Maubesi sebagai ibu kota Kecamatan Insana Tengah. Namun cakupan wilayah desa/kelurahan ini masih dianggap kurang oleh Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan tersebut.

Selama 12 tahun berjalan, Kecamatan Insana Tengah masih memiliki banyak kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi infrastruktur jalan raya yang sempit dan rusak di Kecamatan Insana Tengah. Dilihat dari data panjang jalan menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang berwenang mengelolanya di Kabupaten Timor Tengah Utara, jalan di Kecamatan Insana Tengah merupakan jalan Provinsi sepanjang 14,59 km dan jalan negara sepanjang 12,7 km, namun tidak memiliki jalan yang dikelola oleh Kabupaten (Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka Tahun 2018).

Cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk

memperkecil rentang kendali guna meningkatkan pembangunan masyarakat melalui pembentukan kecamatan baru belum dapat terwujud. Upaya pemerintah kecamatan dalam membangun partisipasi masyarakat pun belum optimal. Kondisi ini diperparah oleh kurang proaktifnya masyarakat dalam menyambut program pembangunan di kecamatan. Masyarakat lebih tertarik untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan dasarnya dibandingkan dengan turut serta dalam program pembangunan.

Efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif mempunyai arti ada pengaruh, dapat membawa hasil (berhasil guna). Dalam setiap organisasi efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu kegiatan dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Handyaningrat (1984: 16) yang mengatakan “efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapai tujuan yang ditentukan sebelumnya”. Bila dilihat dari aspek keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas adalah yang memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi publik. Efektivitas pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian suatu tujuan (Nurmandi, 1999: 193).

Duncan dalam Steers (1985: 53) mengatakan bahwa ukuran efektivitas dapat dilihat dari hal-hal berikut.

- *Pencapaian tujuan.* Adalah suatu keseluruhan upaya pencapaian tujuan

harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: (1) kurun waktu pencapaiannya, (2) sasaran merupakan target yang konkrit, (3) dasar hukum.

- *Integrasi.* Adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu: (1) prosedur, (2) proses sosialisasi.
- *Adaptasi.* Adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu: (1) peningkatan kemampuan, (2) sarana dan prasarana.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah merupakan suatu ukuran kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Berkaitan dengan ini, penulis kemudian menggunakan teori Duncan dalam mengukur efektivitas kebijakan pembentukan kecamatan.

Pembangunan

Secara filosofis pembangunan dapat diartikan sebagai upaya sistemik dan berkesinambungan untuk dapat menciptakan keadaan yang dapat memanusiakan manusia, atau mengadakan atau membuat sesuatu yang belum ada.

Hakikat pembangunan secara sederhana adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pemahaman konsep pembangunan yang ada, masyarakat meyakini bahwa pembangunan sebagai sebuah usaha yang meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sebagaimana yang dikatakan Timothy (1999: 256) yaitu *“development implies making progress toward desirable goals and outcomes, the most important of which is improving the human condition”*.

Menurut Adisasmita tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah menciptakan kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan, dengan tidak mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan masyarakat secara keseluruhan atau peningkatan kualitas hidup secara multidimensional. Beberapa komponen penting dari aspek pembangunan menurut Adisasmita (2014: 16) yaitu:

- a) *Pembangunan ekonomi*; menitikberatkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan potensial.
- b) *Pembangunan fisik dan sosial*; di antaranya dengan memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur.
- c) *Pembangunan lingkungan*; bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat.
- d) *Pembangunan kelembagaan*; yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan,

memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya penguat kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penggunaan desain penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan pemekaran dalam meningkatkan pembangunan di kecamatan pasca pemekaran. Peneliti bermaksud memperoleh gambaran (deskripsi) yang mendalam berdasarkan data dan fakta yang ditemui di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Data dipilih, dipilah dan dianalisis untuk mendapatkan simpulan yang berkaitan upaya pemekaran dalam rangka peningkatan pembangunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Insana tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang wilayahnya sangat cocok untuk pertanian. Hal ini memengaruhi sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Dilihat dari tekstur dan kualitas tanah, Kecamatan Insana Tengah juga cocok untuk usaha batu bata, bahkan menjadi kecamatan pemasok kebutuhan batu bata di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk Tahun 2017, Kecamatan Insana Tengah mempunyai 11.213 jiwa penduduk

dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 90 jiwa per km². Kecamatan Insana Tengah memiliki luas ± 124,00 km² atau 4,64% dari luas daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Kecamatan Insana Tengah memiliki 6 (enam) desa dan 1 (satu) kelurahan. Dari keseluruhan desa dan kelurahan di Kecamatan Insana Tengah jarak tempuh terjauh dari ibu kota kecamatan ke desa sejauh 55 km adalah Desa Tainsala kemudian diikuti oleh Desa Sone sejauh 35 km.

Dilihat dari efektivitas Kebijakan Pemekaran dalam Meningkatkan Pembangunan, dapat diuraikan beberapa hal berikut.

Pencapaian Tujuan

Kecamatan Insana Tengah merupakan pemekaran dari Kecamatan Insana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007. Kecamatan Insana dimekarkan menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Insana Induk, Kecamatan Insana Tengah, dan Kecamatan Insana Barat. Tujuan pemekaran kecamatan ini untuk pemerataan pembangunan, optimalisasi pelaksanaan pemerintahan dan memperpendek rentang kendali pelayanan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat serta mengakomodir aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Bentuk Permukaan Jalan di Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Kecamatan	Hotmix (km)	Aspal (km)	Batu Kerikil (km)	Tanah (km)
1	Miomaffo Barat	-	25,57	17,2	8,98
2	Miomaffo Tengah	-	11,38	10,8	2,18
3	Musi	13,18	25,04	4	
4	Mutis	8,49	5,3	34,25	
5	Miomaffo Timur	24,96	16,41	7,46	21,65
6	Noemuti	36,06	27,65	3,3	
7	Bikomi Selatan	1,9	13,03	13,02	0,8
8	Bikomi Tengah	-	33,05	30,08	1,47
9	Bikomi Nilulat	-	-	-	-
10	Bikomi Utara	-	1,42	3,08	4,4
11	Naibenu	-	-	-	
12	Noemuti Timur	-	-	-	-
13	Kota Kefamenanu	10,89	16,5	17,21	4,22
14	Insana	68,8	52,67	21,98	
15	Insana Utara	-	4,05	1,51	12,81
16	Insana Barat	-	-	-	-
17	Insana Tengah	-	-	-	-
18	Insana Fafinesu	-	-	1,12	9,55
19	Biboki Selatan	-	20,39	14,74	23,75
20	Biboki Tanah	-	7,57	7,39	-

21	Biboki Moenleu	-	9,51	8,85	7,08
22	Biboki Utara	2,91	8,31	10,72	16,88
23	Biboki Anleu	-	4,31	11,48	25,97
24	Biboki Feotleu	-	14,17	13,99	13,41

Sumber: Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa Kecamatan Insana Tengah belum memiliki jalan raya beraspal atau hotmix, sementara kecamatan-kecamatan yang lain hampir sudah mempunyai jalan yang beraspal. Selain infrastruktur berupa jalan raya, infrastruktur berupa gedung persekolahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran juga masih sangat terbatas, dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan. Hal ini mengingat perkembangan kualitas pendidikan menjadi subjek paling mendasar dalam meningkatkan sumber daya manusia di suatu daerah atau negara. Seluruh komponen perkembangan sumber daya manusia di suatu negara atau daerah bergantung pada kualitas pendidikan itu sendiri.

Penyelenggaraan pendidikan di Kecamatan Insana Tengah meliputi tingkatan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Beberapa gedung Sekolah Dasar seperti Sekolah Dasar Katolik Tualeu dan Sekolah Dasar Negeri Mausak serta Sekolah Dasar Haenfeka atapunya masih menggunakan ilalang.

Ketimpangan yang besar terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Insana Tengah hanya ada dua. Dua Sekolah Menengah Pertama tersebut terpusat di ibukota kecamatan. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pelayanan pokok pada jenjang pendidikan ini. Masyarakat mengalami kesulitan memperoleh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama akibat penempatan sekolah yang tidak merata. Kondisi ini berdampak pada sulitnya mewujudkan program pemerintah yaitu wajib belajar sembilan tahun. Kondisi ini diperparah lagi dengan terbatasnya atau minimnya jumlah guru atau tenaga pengajar di jenjang pendidikan menengah pertama.

Selain di Sekolah Menengah Pertama (SMP), kesulitan juga dirasakan di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kecamatan Insana Tengah hanya memiliki dua Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terkonsentrasi hanya pada satu lokasi yaitu di Maubesi. Tentu hal ini akan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas.

Berikut adalah jumlah murid serta jumlah guru yang ada di wilayah Kecamatan Insana Tengah.

Tabel 3 Jumlah Murid dan Guru di Kecamatan Insana Tengah

No	Nama Sekolah	Jumlah Murid			Jumlah Guru		
		L	P	Total	PNS	NON PNS	Total
1	SD Negeri	417	408	825	45	40	85
2	SD Swasta	543	490	1033	19	17	36
3	SMP Negeri	176	187	363	16	19	35
4	SMP Swasta	191	256	447	9	15	24
5	SMA	195	252	447	15	31	46

Sumber: Kecamatan Insana Tengah Tahun 2018

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pendidikan berupa bangunan dan fasilitas sekolah. Hal ini berdampak pada kondisi ekonomi dan ketersediaan tenaga kerja di wilayah Kecamatan Insana Tengah. Kemungkinan lain yang mungkin terjadi dan yang tidak dapat dihindari adalah bertambahnya jumlah pelajar putus sekolah yang pada akhirnya akan berdampak pada tingginya jumlah pengangguran. Data di atas juga menunjukkan bahwa salah satu tujuan pemekaran kecamatan ini untuk pelayanan pendidikan masyarakat.

Integrasi

Perkembangan penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara yang pesat serta dinamisasi dan mobilitasnya yang tinggi memerlukan peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat. Akibat perkembangan tersebut, pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Kondisi tersebut diperparah oleh beban kerja yang luas dan wilayah kecamatan yang sangat besar yang menyebabkan pelayanan

kurang optimal. Penulis menganalisis bahwa sebenarnya sebelum pembentukan suatu kecamatan, yang harus dilakukan pertama-tama adalah menyediakan segala fasilitas dan infrastruktur yang akan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di kecamatan yang akan dibentuk.

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Insana Tengah adalah bahwa pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kurang memperhatikan aspek-aspek di atas sebelum membentuk kecamatan Insana Tengah. Aspek-aspek tersebut baru dilaksanakan pasca pembentukan. Sarana dan prasarana kesehatan dan juga infrastruktur jalan raya baru dibangun setelah pembentukan kecamatan. Sarana-sarana dan fasilitas di atas juga belum memadai atau belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Jalan raya yang dibangun pun hanya terpusat di ibukota kecamatan sehingga akses masyarakat dari desa untuk mendapatkan pelayanan di kecamatan menjadi terhambat.

Adaptasi

- ***Pemahaman Masyarakat akan Pembentukan Kecamatan dan Program Pembangunan***

Keinginan masyarakat untuk membentuk kecamatan baru, sering tidak diikuti oleh partisipasi masyarakat tersebut dalam pelaksanaan penyelenggaraan pasca pembentukan terutama dalam hal pembangunan. Masyarakat di Kecamatan Insana Tengah yang menginginkan pembentukan Kecamatan Insana Tengah guna mendapatkan kemudahan dalam pelayanan, belum paham akan pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap setiap program dari pemerintah terutama di wilayah kecamatan. Kurangnya pemahaman masyarakat ini menjadi salah satu penyebab mengapa program pembangunan di Kecamatan Insana Tengah tidak efektif.

- ***Peran Pemerintah Daerah***

Kecamatan Insana Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Program pembangunan di wilayah Kecamatan Insana Tengah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara harus terus memerhatikan dan mendukung program pembangunan yang ada di Kecamatan Insana Tengah, mengingat kecamatan bukan merupakan daerah otonom yang bisa mandiri dalam hal anggaran.

Berdasarkan fakta di lapangan yang penulis dapatkan ketika melaksanakan

penelitian, terlihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terkesan lambat dalam menyikapi permasalahan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Insana Tengah. Hal ini terlihat dari jumlah sekolah yang masih sedikit baik dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Sekolah Menengah Atas. Beberapa sekolah sudah ada sejak Kecamatan Insana Tengah belum dibentuk. Hal ini berarti pembangunan infrastruktur di Kecamatan Insana Tengah lambat dan belum efektif akibat kurangnya peran dan dukungan dari pemerintah daerah. Beberapa sekolah sudah ada sejak Kecamatan Insana Tengah belum dibentuk. Hal ini berarti pembangunan infrastruktur di Kecamatan Insana Tengah lambat dan belum efektif akibat kurangnya peran dan dukungan dari pemerintah daerah. Selain gedung sekolah, permasalahan pembangunan infrastruktur yang lain adalah kurangnya sarana prasarana kesehatan serta terbatasnya tenaga medis yang ada di Kecamatan Insana Tengah. Akibatnya banyak masyarakat yang kurang mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak, padahal kesehatan merupakan salah satu indikator dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) di suatu daerah atau negara yang kemudian digunakan untuk menilai apakah pembangunan di suatu daerah atau negara tersebut berhasil atau tidak.

Dukungan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Kecamatan Insana Tengah dalam hal anggaran guna meningkatkan pembangunan infrastruktur semestinya ditingkatkan. Hal ini mengingat Kecamatan Insana Tengah merupakan

kecamatan termuda atau kecamatan paling akhir dibentuk di Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun dukungan berupa anggaran tidak pernah ditingkatkan. Penyebabnya adalah beberapa tahun terakhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami defisit. Hal ini berimbas pada berkurangnya alokasi anggaran yang diberikan kepada pemerintah kecamatan termasuk Kecamatan Insana Tengah.

• **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dapat disimpulkan terhalang oleh aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Mata pencaharian masyarakat yang pada umumnya petani dan peternak menyebabkan waktu dan tenaga masyarakat terserap seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menyebabkan program pembangunan terutama pembangunan infrastruktur menjadi terhambat dan tidak berjalan. Walaupun pembangunan infrastruktur dapat ditenderkan kepada pihak ketiga (swasta), namun kendalanya adalah bahwa anggaran yang tersedia sangatlah kurang. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Insana Tengah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

Pertama, Kebijakan Pemekaran Kecamatan dalam mewujudkan

pembangunan di Kecamatan Insana Tengah belum bisa dikatakan efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a) Lemahnya peran kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara kepada Kecamatan Insana Tengah dalam rangka upaya pembangunan infrastruktur.
- c) Sarana dan prasarana transportasi yang belum memadai dan kondisi jalan raya yang rusak.
- d) Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Insana Tengah.

Kedua, upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Insana Tengah meliputi:

- a) Menambah alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan.
- b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Insana Tengah.
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, penulis menyarankan sebagai berikut.

Pertama, dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan

Insana Tengah, diharapkan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat mendukung dengan mengalokasikan dana pembangunan yang lebih kepada Kecamatan Insana Tengah. Hal mengingat Kecamatan Insana Tengah merupakan kecamatan termuda yang terakhir dibentuk. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Insana Tengah.

Kedua, bagi pemerintah Kecamatan Insana Tengah diharapkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Insana Tengah. Selain itu, pemerintah Kecamatan Insana Tengah diharapkan dapat berkoordinasi selalu dengan masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, serta terus mengajak masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah Kecamatan Insana Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pegelolaan Anggaran dan Pendapatan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handayaniingrat, 1984. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Kaho, Josef Riwu. 2004. *Prospek Otoda di NKRI*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Nurmandi. 1999. *Wacana Pembangunan Dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Pide, Andi M. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Timothy, D. J. 1999. *Participatory Planning: A View of Tourism in Indonesia*. California Sage Publications.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan Insana Menjadi Tiga kecamatan yaitu kecamatan Insana Induk, kecamatan Insana Tengah, dan kecamatan Insana Barat.
- Lain-Lain**
- Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Angka 2018.
- Kecamatan Insana Tengah Dalam Angka Tahun 2018.
- Kecamatan Insana Dalam Angka Tahun 2007.